



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUDHI SABARA
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 184985

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	300.000.000
1. Tanah Seluas 4.673 m2 di KAB / KOTA BALANGAN, WARISAN		
Rp. 90.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 455 m2/44 m2 di KAB / KOTA		
BALANGAN, WARISAN Rp. 140.000.000		
3. Tanah Seluas 558 m2 di KAB / KOTA BALANGAN, WARISAN Rp.		
70.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	26.000.000
1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.		
9.000.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.		
17.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	121.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.422.522
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	454.422.522
III. HUTANG	Rp.	329.750.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	124.672.522

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.